

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini merupakan negara berkembang yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ke arah yang lebih baik. Hal ini sudah dimulai dengan adanya bentuk usaha-usaha berskala besar maupun kecil, salah satunya adalah UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berdiri sendiri dan berskala kecil serta dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarga dan juga mengeluarkan modal yang tidak besar. UMKM sangat mempengaruhi perekonomian nasional, karena dapat menyerap jumlah pengangguran (Efriyenti dan Yusran, 2019).

Penerapan laporan keuangan merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh UMKM apabila ingin mengembangkan usahanya, karena dengan adanya pencatatan dan pembukuan akan memudahkan UMKM untuk mengetahui informasi tentang usahanya seperti mengetahui informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan suatu perusahaan dan juga membantu pelaku UMKM untuk mempermudah akses permodalan (Darmayanti *et al.* 2017).

Standar akuntansi keuangan untuk UMKM sudah disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yaitu Standar Akuntansi Keuangan untuk EMKM (SAK EMKM) pada 2016 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018. SAK EMKM ini memiliki tujuan untuk menstandarisasi laporan keuangan UMKM di Indonesia. Laporan keuangan SAK EMKM ditujukan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu usaha yang bermanfaat bagi pengguna dalam mengambil keputusan.

SAK EMKM diterbitkan untuk memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) lebih mudah dibandingkan dengan SAK ETAP karena, terdiri dari tiga komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan SAK ETAP yang terdiri dari lima komponen yaitu, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Kedepannya SAK EMKM ini juga diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.

Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan untuk membantu UMKM di Indonesia dalam melakukan pencatatan laporan keuangan yang benar, seharusnya bisa diterapkan secara optimal oleh pelaku UMKM. Namun, fenomena sekarang masih banyak pelaku UMKM masih belum menerapkan atau melakukan pembukuan secara benar. UMKM pada umumnya masih menerapkan akuntansi yang sederhana atau membuat laporan keuangan seadanya tanpa melihat standar akuntansi yang baik dan benar. UMKM hanya sebatas mencatat penerimaan kas yang diperoleh dari pembayaran piutang secara tunai yang oleh pelanggan (Darmayanti *et al.* 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2018) juga menyatakan bahwa UMKM melakukan pencatatan laporan keuangan dengan peralatan dan pengetahuan yang terbatas, yaitu pencatatan tanpa penerapan akuntansi yang benar.

Seperti halnya di Kabupaten Bangkalan masih banyak UMKM yang melakukan pencacatan seadanya. Masih banyak pemilik usaha mengalami kesulitan untuk memahami dan menyusun laporan yang sesuai dengan standar (Dawam, 2018). Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan juga mengatakan UMKM di Bangkalan hanya mencatat laporan sesuai keinginan masing-masing pemilik UMKM tanpa mengetahui itu adalah pencatatan laporan keuangan yang salah atau benar.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas diduga karena tingkat pendidikan pemilik yang rendah yang membuat pemilik UMKM tidak melakukan pencatatan yang benar, pemilik adalah orang yang memiliki bisnis, yang menanamkan uangnya dalam bisnis atau usahanya dan juga yang menjalankannya karena mereka mengharapkan adanya pendapatan dalam bentuk keuntungan dari bisnis tersebut. Semakin tinggi pendidikan pemilik, maka pemahaman mengenai bisnis dan juga tentang pelaporan keuangan bisnisnya juga semakin baik. Menurut Kusuma dan Lutfiany (2018) “menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM”.

Pemahaman terkait SAK EMKM tersebut erat kaitannya dengan proses pemberian sosialisasi dari Dinas Kopersasi dan UMKM ataupun dari instansi lainnya. Apabila pengusaha mendapatkan informasi dan sosialisasi dengan baik, maka pemahaman mereka terkait SAK EMKM akan menjadi lebih baik dan mendukung proses implementasi SAK EMKM. Penelitian yang dilakukan oleh E Janrosi (2018) menunjukan bahwa pengaruh sosialisasi SAK EMKM berpengaruh terhadap penggunaan SAK EMKM.

Usaha yang semakin berkembang maka akan membutuhkan informasi yang lebih kompleks dan juga membutuhkan laporan keuangan untuk

menghasilkan informasi keuangan secara periodik. Penelitian yang dilakukan oleh Suastini *et al.* (2018) menyatakan “ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM”.

Penelitian ini merupakan penelitian yang sejenis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suastini *et al.* (2018) dengan judul penelitian “PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN UKURAN USAHA TERHADAP PEMAHAMAN UMKM DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK EMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kecamatan Buleleng)”. Dari penelitian yang dilakukan Suastini *et al.* (2018) terdapat perbedaan dalam hal jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian, selain itu objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suastini *et al.* (2018) yaitu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangkalan.

Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kabupaten Bangkalan dan fokus penelitian ini pada UMKM di kecamatan Bangkalan yang berjumlah 7.692 UMKM. Hal ini dilakukan karena di Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan daerah-daerah di Indonesia banyak yang menerapkan sosial distancing sehingga penelitian ini mengambil wilayah Kabupaten Bangkalan supaya mempermudah proses pengambilan data. Pengambilan Kecamatan Bangkalan karena jumlah rata-rata pendapatan UMKM di Kecamatan Bangkalan lebih besar dari kecamatan lainnya di Kabupaten Bangkalan yaitu sekitar Rp.10.000.000 – Rp.25.000.000. Pengambilan Kabupaten Bangkalan juga didukung oleh keterangan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan yang mengatakan bahwa UMKM di kabupaten Bangkalan masih belum memahami pentingnya laporan keuangan, hal

ini bisa dilihat dari UMKM di Bangkalan masih banyak yang menggunakan laporan keuangan sesuai keinginan pemilik UMKM.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu tingkat pendidikan, sosialisasi, dan ukuran usaha sedangkan variabel dependen yaitu implementasi SAK EMKM. Alasan peneliti mengambil variabel tingkat pendidikan yaitu pelaku UMKM di Bangkalan tidak semuanya memiliki pendidikan yang tinggi. Pelaku UMKM di Bangkalan kebanyakan memiliki pendidikan dibawah sarjana, mereka hanya memiliki modal untuk membuka usaha dan menjalankannya tanpa mengetahui pentingnya laporan keuangan.

Peneliti menggunakan variabel sosialisasi yaitu karena sosialisasi bisa memberikan pengetahuan secara langsung kepada UMKM. Sosialisasi di Kabupaten Bangkalan bisa dikatakan tidak begitu baik karena Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan hanya melakukan sosialisasi jika ada anggaran.

Sedangkan peneliti menggunakan variabel ukuran usaha dengan alasan usaha yang makin besar dan berkembang akan membutuhkan laporan keuangan yang baik dan benar, mengingat tingkat transaksi yang padat. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sosialisasi SAK EMKM Dan Ukuran Usaha Terhadap Implementasi SAK EMKM di Kecamatan Bangkalan”.

2.1 Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Bangkalan ?

2. Apakah pengaruh Sosialisasi berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Bangkalan ?
3. Apakah pengaruh Ukuran Usaha berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Bangkalan ?

3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Bangkalan
2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Bangkalan
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran usaha terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Bangkalan

4.1 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemilik UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi UMKM di daerah Kecamatan Bangkalan bahwa dengan tingkat pendidikan, sosialisasi dan ukuran usaha dapat berpengaruh terhadap implementasi laporan keuangan menggunakan SAK EMKM.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam melakukan penelitian.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

